



**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU TEMBAKAU
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2017
TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KECAMATAN
BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**YOZI NOFRIONATA
11527203229**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/2020 M

© Hal cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Sketsa dengan judul “Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan
tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
22/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima
Puluh Kota”, yang ditulis oleh:

Nama : Yozi Nofrionata
NIM : 11527203229
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 November 2019

Pembimbing Skripsi

Nur Hidayat, SH. MH
NIK. 13027038

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU
TEMBAKAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.07/2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

: YOZI NOFRIONATA
: 11527203229
: ILMU HUKUM

: Dimunqasyahkan pada :
: Rabu / 20 Mei 2020
: 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. H. Maghfirah, M.A
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Muslim S.Ag., SH., M.Hum
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. M. Kastulani, SH, MH
(Anggota Penguji)
4. Firdaus SH, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yozi Nofrionata: Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian dilatar belakangi dengan Peraturan Menteri Keuangan menurut pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Batasan masalah penelitian ini penulis akan membatasi pada masalah mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta penelitian ini di fokuskan pada Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dan Apa saja hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau.

Jenis penelitian adalah penelitian hokum sosiologis, yaitu ppenelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan, Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kelompok tani tembakau serta petani khusus tembakau di Kecamatan Bukik Barisan. Jumlah sampel adalah 9 responden dengan menggunakan teknik *Purpodge Sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini, karena minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alokasi DBHCHT menyebabkan kurangnya kontribusi atas peran masyarakat dan perlu koordinasi yang lebih antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Program yang didanai DBHCHT belum bisa terlaksana dan termanfaatkan dengan baik di masyarakat sehingga masih terjadi kekurangan peserta dan tidak tepatnya peserta penerima anggaran DBHCHT yang mengakibatkan DBHCHT tidak terserap dengan tepat dan maksimal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'alamin penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU TEMBAKAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KECAMATAN BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”. Shalawat serta salam juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena merupakan teladan umat yang patut kita contoh dan yang telah menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar di permukaan bumi ini.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari selama pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan baik secara materi maupun motivasi dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta terimakasih sebesar-besarnya kepada:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ismardi dan Ibunda Ernita serta abang ku Syefriadi dan Martha Hendra yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis serta doa yang tulus dan nasehat yang selama ini di berikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag., M. Ag ., selaku rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim.S.Ag, S.H. M Hum, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggrayni, S.H., M.H. selaku penasehat akademis serta seluruh dosen dan staf di Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Masmed, S.Sos Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Bapak Fatmon Hendri, SP seksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produksi Perkebunan Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Petani Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan yang telah mempermudah penulis dalam mencari data-data yang diperlukan serta narasumber dalam penulisan skripsi penulis..

8. Pak Syafwan, Pak Azwar dan Tante Wilda Repelita, orang tua penulis di Nagari Koto Tangah Kecamatan Bukik Barisan yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam mencari data dan narasumber dalam melakukan penulisan skripsi.
9. Teman, Sahabat serta sebagai keluarga, kepada Arvan Tri Ari Wibowo Nst. yang telah banyak membantu, memberi ide, saran serta motivasi kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat BMW Tiva Khairunnisa, Ulfa Novita Sari, Sri Ayu Pratiwi, Sinta Dahlia Fatmawati dan Juni Kasmira yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis selama ini.
11. Adik saya Joni Pranata yang telah membantu menyediakan keperluan dalam melakukan penulisan skripsi.
12. Sahabat-Sahabat seperjuanganku keluarga Ilmu Hukum F dan Hukum Tata Negara A yang telah memberikan warna-warni dan canda tawa serta pengalaman hidup dan tempat bertukar pikiran bagi penulis.
13. Tidak terkecuali seluruh Rekan-Rekan Almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan dalam penulisan ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, Amin ya Rabbal'alam.

Pekanbaru, November 2019

Penulis

Yozi Nofrionata
11527203229

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota	22
B. Gambaran Umum Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota	25
C. Gambaran Umum Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota	28
D. Gambaran Umum Kecamatan Bukik Barisan	30
BAB III TINJAUAN TEORITIS	32
A. Pemerintah Daerah	32
B. Cukai Hasil Tembakau di Indonesia	34



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

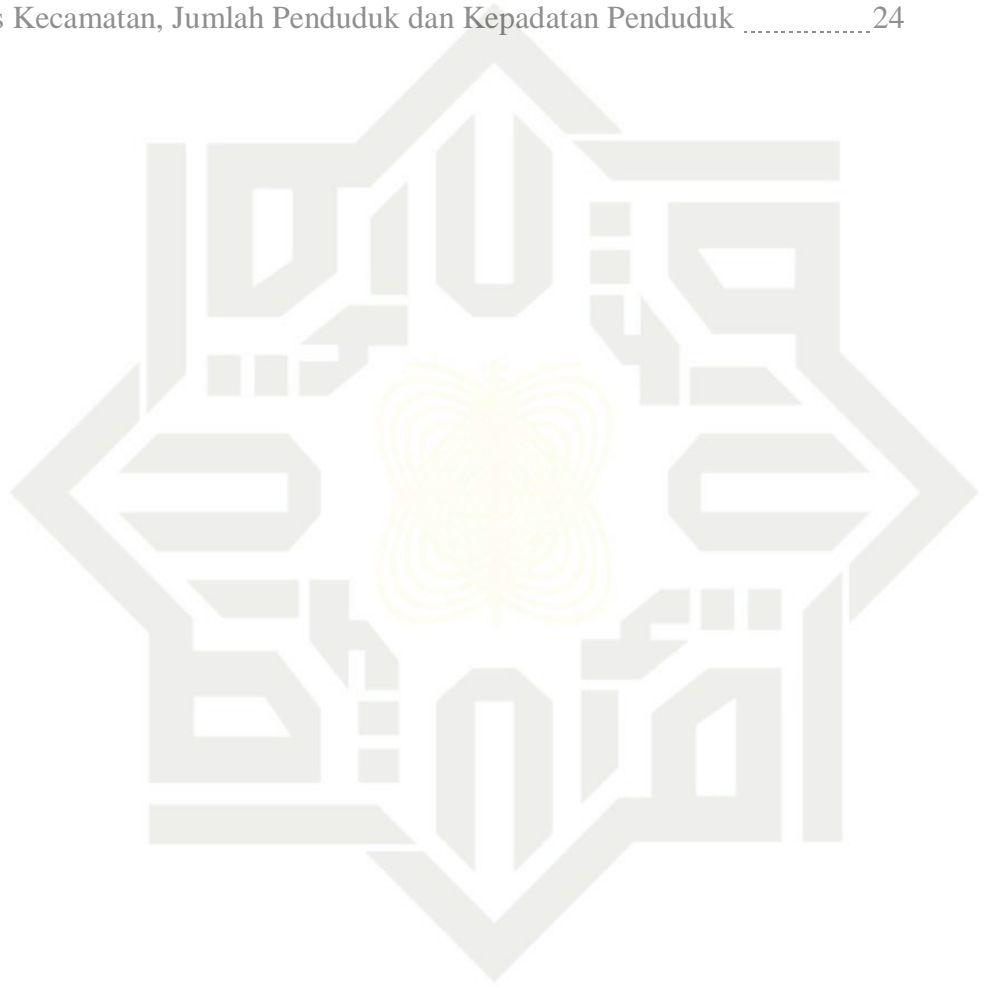
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan	40
B. Hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	16
Tabel II.1 Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	22
Tabel II.2 Luas wilayah kecamatan	23
Tabel II.3 Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	24



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dikatakan bahwa yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah. Pemerintah Daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan sepenuhnya pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri.

Sumber keuangan lainnya bagi Pemerintah Daerah berasal dari Dana Alokasi yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini sesungguhnya berasal dari dana yang dikumpulkan dari bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dana Alokasi ini dibedakan menjadi dua yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.²

¹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam rangka pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan pengelolaan atas dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan dilakukan transfer ke daerah oleh pemerintah pusat. Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer Dana Perimbangan meliputi:

1. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak),
2. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT),
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),
4. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
5. Dana Alokasi Khusus (DAK).³

DBH-CHT termasuk kedalam instrumen kebijakan fiskal melalui alokasi Transfer Ke Daerah dalam APBN, yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus serta Dana Penyesuaian. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan Kepada Daerah dalam satu kesatuan sistem transfer dana dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah guna mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*) dan mengurangi ketimpangan pendanaan urusan pemerintah antardaerah (*horizontal imbalance*).

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia; teori dan praktik*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 509

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan otonomi Khusus di Provinsi.

Dana Bagi Hasil (DBH) lain dimasukkan sebagai bagian dari dana perimbangan dalam rangka otonomi daerah atau desentralisasi, sedang DBH tembakau diatur tersendiri dalam Undang-undang (UU) cukai dan tidak disuntumkan sebagai pendapatan Negara. Cukai dapat dipahami sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam *Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007*.

DBH-CHT adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, DBH-CHT diatur terpisah dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

DBH-CHT diperoleh dari Cukai yang merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik

1. Konsumsi yang dikendalikan,
2. Peredaran yang diawasi,
3. Pemakaiannya yang menimbulkan dampak negative; dan
4. Perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan sebagaimana diatur dalam undang-undang cukai⁴.

⁴Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Dalam konteks cukai hasil tembakau, merupakan barang kena cukai yang terdiri atas sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pemuayannya.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah diatur penggunaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Selanjutnya PMK tersebut direvisi dengan PMK no. 222/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Permenkeu No.28/PMK.07/2016. Dalam peraturan tersebut penggunaan DBHCHT seharusnya untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan cukai ilegal.

Besaran cukai yang dikenakan berdasarkan diatur melalui peraturan menteri keuangan, yang setiap tahun mungkin saja berubah. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Dan penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum oleh aparat yang berwenang.⁵

Sumatra Barat (disingkat Sumbar) adalah sebuah provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km². Dan merupakan rumah bagi etnis Minangkabau, iklim

⁵ Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 UU 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumatra Barat secara umum bersifat tropis dengan suhu udara yang cukup tinggi, yaitu antara 22,6 °C sampai 31,5 °C.⁶ Penerimaan daerah di Sumatera Barat 23,8% dari pertanian dan perputaran ekonomi terbesar yakni di pertanian.⁷ Tembakau merupakan salah satu jenis pertanian yang cukup membantu perekonomian masyarakat Sumbar.

Perubahan sistem pertanian Indonesia terjadi pada waktu bangsa Eropa mulai merambah Indonesia. Portugis, Spanyol, dan Belanda adalah negara-negara yang mempunyai kepentingan dagang di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pertanian tradisional diubah menjadi sistem komersial untuk tanaman-tanaman yang diperlukan bagi perdagangan mereka. Karena itu perkebunan teh, kopi, kina, karet, tembakau, dan sebagainya mulai menghiasi bumi Indonesia.⁸

Tembakau adalah produk pertanian yang diproses dari daun tanaman *genus nicotiana*. Tembakau merupakan salah satu bahan baku pembuatan rokok kretek yang sangat digemari orang Indonesia, tembakau yang baik (komersial) hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau ditentukan oleh lokasi penanaman dan pengolahannya. Akibatnya, hanya beberapa tempat yang memiliki kesesuaian dengan kualitas tembakau terbaik.⁹

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat#cite_note-dkp-6 (Diakses Rabu, 24 April 2019 Jam 21.27 wib)

⁷<https://www.sumbarfokus.com/berita-sektor-pertanian-masih-menjadi-andalan-di-sumbar.html> (Diakses Rabu, 1 Mei 2019)

⁸ Setiajati D. sastrapradja, *Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 31

⁹ Suwanto & Yuke Octavianty, *Budi Daya 12 Tanaman Perkebunan dan Unggulan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2010), h. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak jenis tanaman tembakau di Indonesia yang dibudidayakan oleh rakyat ataupun badan-badan hukum swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, tidak semua jenis tembakau dapat memberikan keuntungan yang sama besar karena setiap jenis tembakau memiliki kualitas dan kegunaan yang berbeda-beda dalam industri rokok. Dalam industri rokok, dikenal tiga jenis daun tembakau, yakni daun pembungkus, daun pembalut dan daun pengisi. Ketiga jenis daun tembakau tersebut dihasilkan dari jenis tembakau yang tidak sama. Misalnya, jenis daun pembungkus dihasilkan dari tembakau cerutu. Berdasarkan jenis daun yang dihasilkan, tembakau dibagi menjadi lima jenis, yakni (1) tembakau cerutu; (2) tembakau pipa; (3) tembakau sigaret (4) tembakau asli/rajan; dan (5) tembakau asepan.¹⁰

Tanaman tembakau merupakan tanaman tropis yang dapat hidup pada rentang iklim yang luas. Karena responnya netral terhadap panjang hari, tanaman tembakau dapat tumbuh dari 60° LU-40° LS. Batas suhu minimum, yaitu 15° C dan suhu maksimum 42° C. suhu ideal saat siang hari adalah 27° C. Sejak tanaman tembakau ditanam hingga fase pemasakan daun diharapkan kondisinya kering. Curah hujan merupakan factor penentu hasil dan mutu tembakau. Pengaturan waktu tanam yang didasarkan periode kering sangat menentukan keberhasilan usaha tani tembakau.

Tekstur tanah lapisan atas yang baik untuk tanaman tembakau adalah lempung berpasir atau pasir berlempung dengan *subsoil* liat berpasir. Tanah-tanah tersebut mempunyai porsi udara dan air tanah yang optimum bagi pertumbuhan

¹⁰ Bambang Cahyono, *Tembakau Budidaya dan Analisis Usaha Tani*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akar tanaman tembakau. Selain itu, tanaman tembakau menghendaki tanah yang strukturnya baik, remah serta gembur, drainasenya baik, kisaran pH 6,0-7,5, dan memiliki daya pegang air yang baik.¹¹ Tembakau dipanen dalam waktu yang relative lebih singkat disbandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Pemanenan tergantung warna daun, waktu pemanenan, dan teknik pemanenan. Secara umum tembakau dipanen satu kali untuk seluruh daun.¹²

Tembakau dapat tumbuh di mana-mana, walaupun iklimnya berbeda-beda, di pegunungan, di dataran rendah, bahkan di tepi pantai pun tembakau dapat tumbuh dengan subur. Misalnya di daerah Pegunungan Dieng yang tingginya 2000-2300 meter dari permukaan laut, daerah garut dan lain-lain. Tanaman tembakau dapat tumbuh dengan subur di berbagai daerah yang iklimnya berbeda-beda. Hanya baik dan buruknya hasil tanaman itu tergantung pada hujan. Sebab hujan itu sangat besar pengaruhnya terhadap tanaman tembakau.¹³

Berbagai tembakau rakyat umumnya digunakan untuk rokok kretek khas Indonesia dan sebagian kecil sebagai tembakau kunyah. Jenis-jenis tembakau rakyat yang terkenal diproduksi daerah-daerah setempat antara lain : tembakau Sokok, tembakau Payakumbuh, tembakau Pariaman, di Sumatera; tembakau Mulek, tembakau Banyumas, tembakau Kedu, tembakau Boyolali, tembakau Lemajang, tembakau Kalisat, tembakau Madura di Jawa; tembakau Ampenan di Lombok; tembakau Sopeng, tembakau Palu di Sulawesi dan masih banyak lagi.¹⁴

¹¹ Suwanto & Yuke Octavianty *Ibid.*, h. 227-228

¹² *Ibid.*, h.237

¹³ S. Akbar, *Bercocok Tanam Tembakau*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1985), h. 19

¹⁴ Djarir Makfoed, *Mengenal Beberapa Penilaian Fisik Mutu Tembakau di Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1982), h.2

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kondisi iklim dan keadaan topografi Sumbar yang cocok untuk tembakau membuat para petani cukup banyak memilih menjadi petani tembakau. Salah satu Kabupaten penghasil tembakau terbanyak di Sumbar adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km² dan berpenduduk sebanyak 348.555 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini terletak di bagian Timur wilayah Provinsi Sumatera Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi.¹⁵ Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan cukup tinggi. Sedangkan untuk suhu rata-rata berkisar 28°C sampai 33°C.

Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian meliputi usaha-usaha di subsektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, kehutanan, perikanan serta perkebunan. Berdasarkan data dari PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku tahun 2013 subsektor tanaman pangan dan hortikultura memiliki nilai paling tinggi. Kemudian diikuti oleh subsektor perkebunan, peternakan, perikanan dan yang terakhir subsektor kehutanan¹⁶.

Kabupaten Limapuluh Kota sebagai salah satu penghasil tembakau di Sumatera Barat, sehingga Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Kabupaten Lima Puluh Kota, mendapat alokasi dana Rp. 2.683.510.365. Hal itu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 903-521-2018

¹⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota#Kecamatan (Diakses Selasa, 20 Maret 2019 jam 22.02 wib)

¹⁶BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 903-1044-2017 tentang Perkiraan Alokasi DBHCHT bagian PemprovSumbar dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dana bagi hasil untuk Limapuluh Kota, dialokasikan pada Dinas Tanaman Pangan *Hortikultura* dan Perkebunan (Distanhortbun) sebesar Rp. 1.000.000.000 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp. 1.070.000.000, pada RSUD Acmad Darwis Seiki sebanyak Rp. 447.000.000, dan Bagian Perekonomian pemkab setempat, Rp. 334.507.033.

Kabupaten Limapuluh Kota, saat ini merupakan daerah penghasil tembakau terbanyak di Sumatera Barat, yang tersebar pada beberapa nagari dan sejumlah kecamatan. Diantaranya, produksi tembakau yang terkenal adalah tembakau Guntung dan Baruah Gunung, Kecamatan Bukik Barisan, tembakau di Kecamatan Harau, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Lareh Sago Halaban dan lain.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, gencar membuat promosi hingga menajajaki kerjasama bisnis disektor komoditi tembakau. Kerjasama bisnis yang teralisasi adalah komoditi tembakau hitam, yang dijalin pemerintah Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.Potensi hasil perkebunan tembakau di daerah Kabupaten lima puluh kota cukup besar. Karena itu mutu dan produksi tembakau harus lebih meningkat lagi.¹⁷

Alokasi dana cukai hasil tembakau harus digunakan untuk lima program, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 6 ayat (1) Permenkeu No.

¹⁷<https://www.harianhaluan.com/news/detail/71739/limapuluh-kota-penghasil-tembakau-terbaik-di-sumbar> (Diakses Selasa, 26 Maret 2019 Jam 22.20 wib)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

222/PMK.07/2017. Hal ini berarti bahwa DBHCHT harus digunakan untuk mendanai kegiatan pada tingkat petani penghasil tembakau yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan serta transfer dan pengawalan teknologi agar dapat menghasilkan bahan baku yang diharapkan. Dengan kata lain, penggunaan atau pemanfaatan DBHCHT yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Permenkeu No. 222/PMK.07/2017 tersebut adalah prioritas penggunaan anggaran yang harus diutamakan. Kenyataan dilapangan tidaklah demikian, justru kalusul ketiga pembinaan sosial lah yang mengakuisisi penggunaan dana tersebut.

Menteri Keuangan harus mengakomodasi dalam aturan terhadap kebutuhan petani, khususnya petani dan buruh tembakau serta lebih serius dalam memantau program yang dijalankan oleh kelompok tani. Hingga kini masyarakat petani dan buruh industri tembakau belum merasakan manfaat DBHCHT. Masalah inilah yang terjadi di kabupaten limapuluh kota khususnya kecamatan bukit barisan, maka dari sini dapat diketahui bahwa ada permasalahan terkait pengalokasian DBHCHT agar dapat dialokasikan secara maksimal dan menghindari penyalahgunaan penggunaan DBHCHT oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
5. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini perlu diteliti dikarenakan tidak optimalnya pengalokasian DBHCHT untuk meningkatkan kualitas bahan baku di area perkebunan tembakau sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, yakni terdapat pada Pasal 6 ayat 1 tentang program Peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan, penerapan pembudidayaan sesuai dengan *Good Agricultural Practices* tembakau; penanganan panen dan pasca panen; dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau; penumbuhan dan penguatan kelembagaan; penerapan inovasi teknis dan/atau; pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.¹⁸

Kontrol alokasi dan penggunaan DBHCHT sulit dilacak beda dengan DBH lain, pengelolaan DBHCHT wewenangnya adalah Gubernur yang kemudian Bupati/walikota yang mengatur pembagiannya beda dengan DBH lain wewenang dan pengaturannya dari pusat. Jika terjadi penyalahgunaan penggunaan DBHCHT hanya dikenakan sanksi administrasi, perbedaannya dengan DBH lain dimasukkan pada ranah korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah “PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU TEMBAKAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07/2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KECAMATAN BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”

¹⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau



Batasan Masalah

Dengan mengingat keterbatasan pemikiran serta waktu yang penulis miliki, maka dalam skripsi ini penulis akan membatasi pada masalah mengenai Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan?
2. Apa saja hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan.
2. Untuk mengetahui hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai pengaplikasian teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
3. Untuk menghasilkan bahan pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah.¹⁹ Adapun untuk metode Penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990),
Cetakan-1., h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara.

Jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.

Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan social, kultur. Kajian ini bersifat *deskriptif*. Pendekatan hukum melalui kajian empiris yang lahir di awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte (1798-1857) diberi nama *sosiologi*. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan social dan kemajuan social.²¹ Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial.²²

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.²³

²⁰ Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : alfabeta, 2012), h.2

²¹ Yesmil Anwar & Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 84-95

²² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 167

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berkaitan dengan program yang dilakukan Pemerintah guna kesejahteraan masyarakat.

Lokasi Penelitian

Saya pernah mengobservasi dan studi pendahuluan di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan saya menemukan masalah-masalah seperti tidak tepat sasaran alokasi DBHCHT serta kurang koordinasi dan pemantauan terhadap penerima DBHCHT tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.²⁵

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.²⁶

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.90

²⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.79

²⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014) h. 106

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Sampel

Responden	Populasi	Sampel	Persentase
Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota	29 Orang	1 Orang	3,4%
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1 Orang	1 Orang	100%
Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota	24 Orang	2 Orang	8,3%
Kelompok Tani Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan	25 Orang	5 Orang	20%
Jumlah	52 Orang	9Orang	%

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.²⁷Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan yakni Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, Seksi Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, Ketua Kelompok Tani, Petani Tembakau yang menerima Dana Bagi Hasil

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), h.91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cukai Hasil Tembakau, Petani Khusus Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dan hal-hal yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan pengalokasiannya di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Limapuluh Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.²⁸Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini data sekunder di peroleh dari Lembaga maupun Perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni berupa buku-buku mengenai Pajak, Retribusi dan Cukai. Buku-buku mengenai pemerintahan daerah serta Jurnal maupun Penelitian terdahulu mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, cukai dan tembakau.

²⁸Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data.²⁹ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah:

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan gambaran kondisi nyata yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan baik berubah pendapat, teori, buku, surat kabar dan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan dalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan³⁰

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan,

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta : Andi offset,1993), h. 83

³⁰ *Op,cit.*, Muh. Abdul Kadir, h.127



pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu digunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu terdiri dari sejarah berdirinya Kabupaten Limapuluh Kota, visi dan misi Kabupaten Limapuluh Kota, keadaan geografis, dan demografis Kabupaten Limapuluh Kota. Serta sejarah mengenai perkebunan tembakau dan pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Limapuluh Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritik, bab ini menerangkan pengertian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintahan Daerah, pajak retribusi daerah, cukai dan mengenai tembakau.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian yang terdiri Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam program peningkatan kualitas bahan baku di kecamatan bukik barisan dan Untuk mengetahui hambatan kelompok tani di kecamatan bukik barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU



1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pintu gerbang utama dijalur darat dengan Provinsi Riau. Secara geografis Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada 0°25'28,71" LU - 0°22'14,52" LS dan 100°15'44,10" BT - 100°50'47,80" BT dan memiliki luas wilayah 3.354,30 Km² yang berarti 7,94 persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 Km². Secara administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :³¹

Tabel II.1
Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

BATAS DAERAH	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kab. Rokan Hulu dan Kab. Kampar Provinsi Riau
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kab. Agam dan Kabupaten Pasaman
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau

Berdasarkan pembagian wilayah secara administratif, maka Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 13 kecamatan, yang terdiri dari 79 nagari dengan 401 jorong. Diharapkan dengan struktur organisasi pemerintahan yang seperti ini, kemudian ditambah dengan adanya perangkat pemerintahan di tingkat Kabupaten, pelayanan aparatur dan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar.

³¹ Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan yang paling luas di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kecamatan Kapur IX yaitu seluas 723,36 Km² atau 21,57% dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Luak (61,68 Km² atau 1,84% dari luas Kabupaten). Luas wilayah per Kecamatan secara rinci dapat dilihat pada **Tabel II.2** berikut ini:

Tabel II.2
Luas wilayah kecamatan

No.	Kecamatan	2015	2016	2017
		Luas Wilayah (KM2)	Luas Wilayah (KM2)	Luas Wilayah (KM2)
1.	Payakumbuh	99	99	99
2.	Akabiluru	94	94	94
3.	Luak	62	62	62
4.	Lareh Sago Halaban	395	395	395
5.	Situjuah Limo Nagari	74	74	74
6.	Harau	417	417	417
7.	Guguak	106	106	106
8.	Mungka	84	84	84
9.	Suliki	137	137	137
10.	Bukik Barisan	294	294	294
11.	Gunuang Omeh	157	157	157
12.	Kapur IX	723	723	723
13.	Pangkalan Koto Baru	712	712	712

Tabel II.3
Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2015

No.	Kecamatan	Luas/Area (km2)	Penduduk	Kepadatan Per km2
1.	Payakumbuh	99	34.243	344
2.	Akabiluru	94	26.809	284
3.	Luak	62	26.941	437
4.	Lareh Sago Halaban	395	36.889	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Situjuah Limo Nagari	74	21.460	289
6.	Harau	417	49.664	119
7.	Guguak	106	35.956	339
8.	Mungka	84	26.523	317
9.	Suliki	137	15.094	110
10.	Bukik Barisan	294	23.038	78
11.	Gunuang Omeh	157	13.204	84
12.	Kapur IX	723	29.128	40
13.	Pangkalan Koto Baru	712	30.036	42
	Kabupaten	3.354	368.985	110

Sumber Data : BPS Kab. Lima Puluh Kota

B. Gambaran Umum Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi dan Misi Badan Keuangan

Visi :

Dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk "Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pemerintahan Kabupaten dan Nagari" maka Badan Keuangan menetapkan Visi:

Terwujudnya Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

Misi :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Badan Keuangan mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi
6. Meningkatkan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Meningkatkan pengendalian kepada aparaturnya pengelolaan keuangan daerah

a. **Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, bidang pengelolaan barang milik daerah, bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dan bidang pengelolaan pendapatan daerah kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut:

- 1) Bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- 4) Melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 5) Melaksanakan pengawasan pelayanan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati.³²

C. Gambaran Umum Dinas Tanam Pangan *Hortikultura* dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Tanam Pangan *Hortikultura* dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membantu Bupati Lima Puluh Kota dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

³²<https://bk.limapuluhkotakab.go.id/> (Diakses Rabu, 24 April 2019 Jam 14.20 wib)

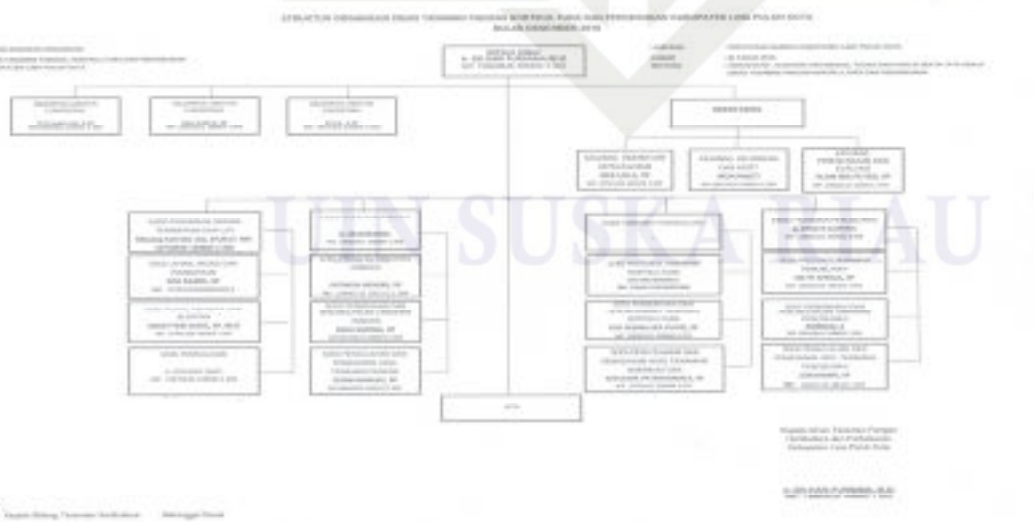
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Pertanian dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas dalam mendukung pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, pada dasarnya kegiatan Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai “pendukung” bagi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Kebersamaan, Kemakmuran dan Kesejahteraan di Lima Puluh Kota yang Bernuansa Adat Bersandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan sesuai dengan Visi Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanam Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Petani”.³³

Gambar II.1 Struktur Organisasi



³³ Buku Statistik Dinas Tanam Pangan *Holtikultura* dan Perkebunan Kabupaten 50 Kota

Gambaran Umum Kecamatan Bukik Barisan

Kecamatan Bukik Barisan memiliki luas daerah 294,20 Km² dan diapit oleh 6 Kecamatan dan 1 Kabupaten yaitu: Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Suliki, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Guguk, Kecamatan Mungka dan Kabupaten Pasaman dengan ketinggian dari permukaan laut 550,20 meter. Kecamatan Bukik Barisan terdiri dari 4 batas daerah, sebelah Utara yaitu Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX, sebelah Selatan Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunung Omeh, sebelah Barat yaitu Kabupaten Pasaman, dan Sebelah Timur Kecamatan Mungka dan Guguk.³⁴

Kecamatan Bukik Barisan terdiri dari 6 Nagari dengan 8 Orang Camat dari masa jabatan 2008-sampai sekarang. Pada setiap nagari yang ada di Kecamatan Bukik Barisan memiliki 39 Jorong, dimana jorong terbanyak pada nagari maek dengan Ibu Pemerintah Ronah dan Bukik Barisan dengan Ibu Pemerintah Banja Loyeh sebanyak 6 Jorong dan Nagari Sungai Naniang dengan Ibu Pemerintah Pasia Baru memiliki Jorong sebanyak 5 Jorong.

Jumlah penduduk Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 23.594 jiwa, dengan rincian 11.583 jiwa penduduk laki-laki 12.011 jiwa penduduk perempuan. Kalau dilihat dari jumlah jorong yang ada di Kecamatan Bukik Barisan sebanyak 39 jorong, maka dengan jumlah penduduk sebesar 23.594 jiwa tersebut rata-rata jumlah penduduk per jorong adalah sebesar 628 jiwa.

³⁴ BPS Kabupaten Lima Puluh Kota



Nagari yang paling tinggi jumlah penduduknya adalah nagari Maek dengan jumlah 9.907 jiwa.

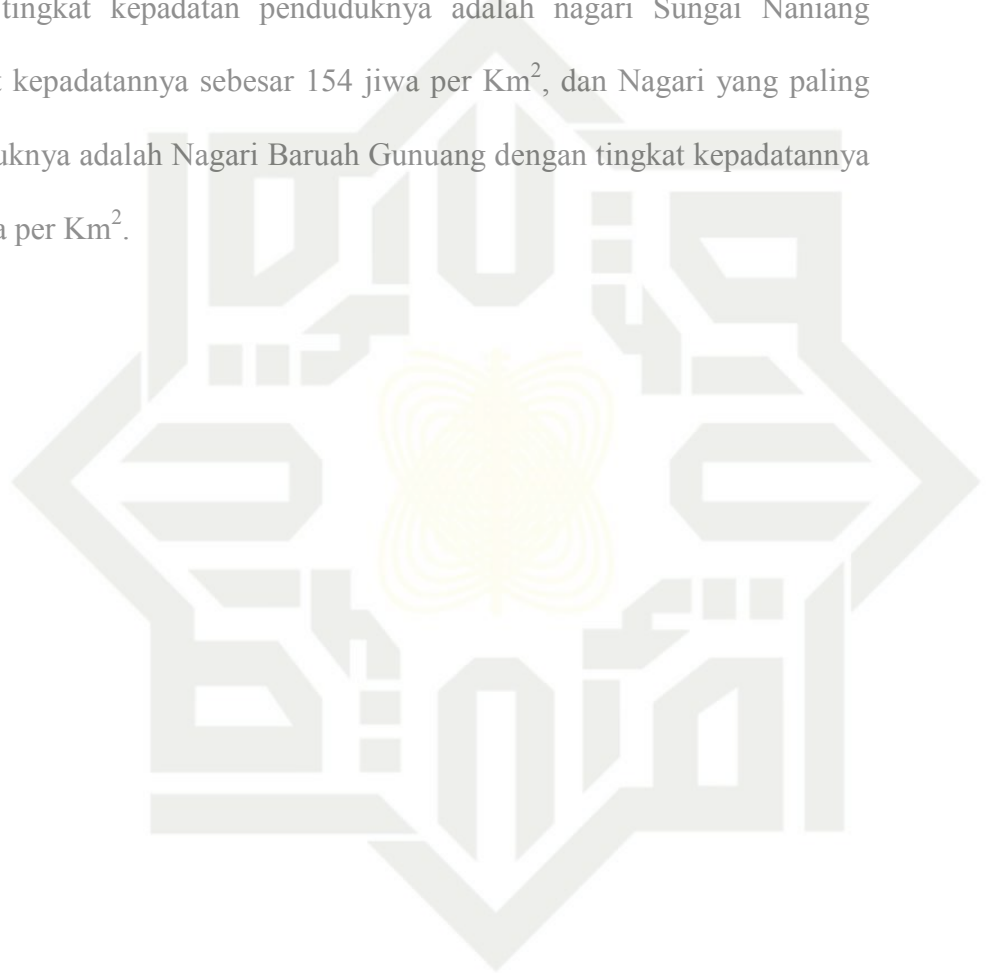
Kepadatan penduduk Kecamatan Bukik Barisan pada tahun 2018 mencapai 80 jiwa per Km^2 dengan luas Kecamatan sebesar 294.20 Km^2 . Nagari paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah nagari Sungai Naniang dengan tingkat kepadatannya sebesar 154 jiwa per Km^2 , dan Nagari yang paling jarang penduduknya adalah Nagari Baruah Gunuang dengan tingkat kepadatannya sebesar 65 jiwa per Km^2 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah Provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota, serta pemerintah daerah ini sendiri memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuan daerah.³⁵

Dalam pasal 18 uud 1945 dikatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas perbantuan.³⁶

³⁵ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), h. 14

³⁶C.S.T. kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga itudaerah itu. Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang di gaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.³⁷

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu. Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelike decentalosatie*) Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pemilihan mentri kepda gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan setrusnya secara berjenjang. Desntralisasi yang semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa -bawa.³⁸

Dari segi ekonomi, pemerintah mempunyai tiga fungsi utama, yaitu mengatasi masalah inefisiensi dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, mendistribusikan penghasilan dan kekayaan kepada masyarakat sehingga tercapai masyarakat yan adil dan makmur. Selain itu, pemerintah juga berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi perekonomian dan menjaga atau menjamin tersedianya lapangan kerja

³⁷ Ibid., h. 142

³⁸ Hanafi Nurcholis, *Teori Dan praktek pemberitaan dan otonomi daerah*, (Jakarta: PT Grasindo), 2005, h.4



(memperkecil tingkat pengangguran) serta penjaga stabilitas harga. Fungsi tersebut oleh Musgrave disebut sebagai *Fiscal Function*.³⁹

Cukai Hasil Tembakau Di Indonesia

Sejak diperkenalkan pada tahun 1830 dan berhasil dikembangkan secara masif menjadi salah satu tanaman ekspor andalan sejak tahun 1858, tembakau sudah menjadi salah satu sumber pemasukan keuangan negara bagi pemerintah kolonial Belanda. Maka, sejak saat itu pula, komoditas ini dibebani pungutan pajak dalam bentuk cukai, yakni atas produk olahannya dalam bentuk rokok, sehingga sering juga disebut sebagai ‘cukai rokok’.⁴⁰

Namun, peraturan resmi yang sistematis atas pemungutan cukai tembakau tersebut baru terwujud menjelang pertengahan abad ke-20. Pemerintah kolonial Belanda mengaturnya dalam Staatsblad Nomor 517 Tahun 1932, Staatsblad Nomor 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan Staatsblad Nomor 234 Tahun 1949 tentang ‘Tabaksaccijns Ordonnantie’. Semua peraturan itu mengatur tentang pita cukai, bea ekspor dan bea masuk impor, termasuk di dalamnya adalah ketentuan mengenai besaran jumlah yang diterima pemerintah dari pengutipan cukai tersebut.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia melanjutkan pemungutan cukai tembakau dalam UU Darurat Nomor 22 Tahun 1950 Penurunan Cukai Tembakau. Undang-undang ini mengatur harga jual eceran (HJE), pemungutan cukai yang diturunkan, dan penetapan golongan-golongan pengusaha tembakau

³⁹ Haula Rosdiana & Edi Slamet Rianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 32

⁴⁰ Gugun El Guyanie, dkk. *Ironi Cukai Tembakau: Carut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2013), h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibebani kewajiban membayar cukai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1951 kemudian mengatur penetapan besarnya pungutan cukai hasil tembakau dengan cara melekatkan pita cukai warnawarni yang beragam pada beberapa jenis atau penggolongan hasil tembakau yang diproduksi, yaitu: cerutu dan rokok yang dibuat dengan mesin (sekarang disebut sebagai ‘Sigaret Kretek Mesin’ atau SKM).⁴¹

Pada tahun 1956, dikeluarkan UU Nomor 16 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud untuk mengurangi dampak semakin banyaknya perusahaan-perusahaan rokok

--terutama perusahaan-perusahaan kecil skala rumah tangga-- yang bangkrut akibat tingginya pengenaan cukai tembakau, selain untuk merapihkan semua peraturan yang sudah ada mengenai rokok sebagai produk hasil tembakau. Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan rokok berupa penurunan cukai pada jumlah tertentu dan pembebasan cukai atas pengusaha-pengusaha rokok selama satu tahun (tax holiday). Undang-undang baru ini tidak lagi menetapkan cukai berdasarkan HJE per bungkus rokok, tetapi pada setiap batang rokok. Kebaikan peraturan ini adalah bahwa pengusaha dapat menghitung harga penjualan produk mereka dengan cara menghitung jumlah cukai yang ditetapkan, sehingga harga jual ecerannya dapat diubah sewaktu-waktu apabila pangsa pasar dari harga bahan baku berubah-ubah dengan tidak perlu menambah pita cukainya.

⁴¹Ibid.,h. 21-22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pengaturan cukai rokok atau cukai hasil tembakau semakin kompleks dan semakin dipadukan dengan semua ketentuan mengenai cukai komoditi lainnya dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Undang-undang ini kemudian diterapkan melalui berbagai peraturan pemerintah (PP), antara lain, PP Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai, PP Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai, dan PP Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Pada dasarnya, penetapan besarnya cukai pada masa ini menggabungkan pendekatan atas dasar HJE dan atas dasar jumlah batang rokok yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.⁴²

Reformasi sistem politik dan hukum nasional pada tahun 1998 mengakibatkan perubahan dan pembaharuan pada banyak undang-undang, termasuk undang-undang tentang cukai. Lahirlah UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Khusus untuk cukai rokok atau cukai hasil tembakau, undang-undang baru ini sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda dengan undang-undang yang digantikannya, terutama dalam cara dan basis perhitungan besaran cukainya serta pemberlakuan cukai beragam (differential tariff) sesuai dengan penggolongan jenis rokok dan skala produksinya.

Apa yang nisbi baru adalah bahwa cukai hasil tembakau kini dimasukkan dalam perhitungan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah

⁴²*Ibid.*, h. 22

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah penghasil tembakau, sehingga melahirkan istilah ‘Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau’ (DBHCHT) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau & Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.⁴³

1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tak dapat dipisahkan dari konsepsi Dana Bagi Hasil (DBH) secara umum. Adapun konsep DBH itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi sebagai salah satu hasil terpenting dari reformasi sistem politik dan hukum nasional sejak tahun 1998.⁴⁴

DBH-CHT adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, DBH-CHT diatur terpisah dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dalam perjalanannya kemudian, setahun ada dua alokasi DBHCHT, yakni alokasi sementara dan alokasi definitif. Potensi penerimaan CHT dari

⁴³*Ibid.*, h. 22-23

⁴⁴*Ibid.*, h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendasari besaran alokasi sementara, sedangkan alokasi definitif berdasarkan realisasi pada kurun sebelumnya, pelaksanaan program, dan anggaran setiap daerah. Transfer ke daerah dibagi dalam empat tahap, berturut-turut pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Besaran transfer tahap pertama adalah 20%, kedua dan ketiga adalah 30%, sedangkan yang keempat berdasarkan selisih antara pagu alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan pertama hingga ketiga.⁴⁵

2. Cukai

Cukai ialah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tariff yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Cukai tidak dikenakan atas semua barang. Barang-barang yang dikenakan cukai antara lain adalah: tembakau, gula, bensin, dan minuman keras.⁴⁶

Dalam konteks cukai hasil tembakau, merupakan barang kena cukai yang terdiri atas sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuayannya.

⁴⁵<https://bolehmerokok.com/2019/12/sejarah-singkat-perkembangan-cukai-rokok-dan-dibebaskan-di-indonesia/> (diakses Selasa, 26 Mei 2020 jam 20.15 wib)

⁴⁶Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006). h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat mengungkapkan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dilaksanakan Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada PMK Nomor 222/PMK.07/2017. Dan sudah terlaksana dengan baik, karena berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan Instansi terkait, dengan para petani tembakau khusus dan kelompok tani dengan persentase laporan realisasi DBHCHT sebesar 92,77% maka penulis dapat berkesimpulan bahwa pelaksanaan ini terlaksana dengan kriteria efektif, hanya saja terdapat kendala mengenai kurangnya pemantauan dari koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau sehingga terdapat pengalokasian dana yang kurang tepat sasaran.

Faktor penghambat dalam program peningkatan kualitas bahan baku tembakau adalah program yang didanai DBHCHT belum bisa terlaksana dan dimanfaatkan dengan baik di masyarakat sehingga masih terjadi kekurangan peserta dan tidak tepatnya peserta penerima anggaran DBHCHT yang mengakibatkan DBHCHT tidak terserap dengan tepat dan maksimal. Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alokasi DBHCHT menyebabkan kurangnya kontribusi atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Saran

peran masyarakat serta perlu koordinasi yang lebih antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

Setelah memperhatikan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, sehingga penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan selanjutnya dapat mengemukakan beberapa saran. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemantauan penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Koordinator DBHCHT yang bertugas memonitoring kegiatan yang dilakukan menggunakan DBHCHT, memantau kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani, sehingga dapat menghasilkan alokasi yang tepat sasaran.
2. Sebaiknya pemerintah memasukkan petani khusus kedalam peserta target pengalokasian DBHCHT agar dana terserap secara maksimal dan tepat. Serta diadakan seleksi khusus untuk membentuk kelompok tani Demplot tembakau ataupun kelompok Subrodi agar anggota kelompok dapat melaksanakan Program peningkatan kualitas bahan baku tembakau sesuai dengan tujuan.
3. Sebaiknya para petani penerima alokasi DBHCHT lebih bijak lagi menggunakan serta memanfaatkan dana alokasi agar dapat memproduksi tembakau yang bermutu dan berkualitas.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Achiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010
- Bambang Cahyono, *Tembakau Budidaya dan Analisis Usaha Tani*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- C.S.T. kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010
- Djarir Makfoed, *Mengenal Beberapa Penilaian Fisik Mutu Tembakau di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Gugun El Guyanie, dkk. *Ironi Cukai Tembakau: Carut-marut Hukum & Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Berdikari, 2013
- Hanafi Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT.Grasindo, 2005
- Haula Rosdiana & Edi Slamet Rianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia; teori dan praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Sajjati D. sastrapradja, *Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Sekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sugianto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung : alfabeta, 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1. Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005
2. Soatman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014
3. Soerisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi offset, 1993
4. Soerisno Hadi, *Metode Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990 Cet ke-1.
5. Swarto & Yuke Octavianty, *Budi Daya 12 Tanaman Perkebunan dan Unggulan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2010
6. Soekbar, *Bercocok Tanam Tembakau*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1985
7. Yesmil Anwar & Andang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Grasindo, 2008,

Peraturan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Websites:

- Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
- BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota
- BPS Kabupaten Lima Puluh Kota
- <https://www.sumbarfokus.com/berita-sektor-pertanian-masih-menjadi-andalan-di-sumbar.html>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat#cite_note-dkp-6
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota#Kecamatan
- <https://www.harianhaluan.com/news/detail/71739/limapuluh-kota-penghasil-tembakau-terbaik-di-sumbar>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://bolehmerokok.com/2019/12/sejarah-singkat-perkembangan-cukai-rokok-dan-dbhcht-di-indonesia/>

Wawancara:

Anggota Kelompok Subrodi di Nagari Koto Tengah dengan Pak Syafwan pada tanggal 13 Oktober 2019 pukul 10.35 WIB.

Anggota DPC Kabupaten Lima Puluh Kota Seksi Pemasaran dengan Pak Azwar pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 20.25 WIB.

Bagian Produksi Tanaman Perkebunan di Dinas Tanam Pangan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Buk Iis Sugiarti pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 16.15 WIB.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Pak Masmed tanggal 23 Oktober 2019 pukul 09.15 WIB

Ketua Kelompok Tani Tembakau dengan Pak Pio Puspito pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 09.20 WIB.

Petani Khusus Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dengan Pak Salman pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 14.35 WIB.

Petani Khusus Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dengan Pak Thomas Ari Nanggalo pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 10.15 WIB.

Setoran Daerah bagian Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pak Yusnadi pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB.

Setoran Produksi Tanaman Perkebunan di Dinas Tanam Pangan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pak Fatmon Hendri pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 14.35 WIB.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Masmed, S.Sos



Wawancara dengan Bapak Fatmon Hendri, SP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Azwar



Wawancara dengan Bapak Syafwan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Thomas Ari Nanggalo



Wawancara bersama Bapak Salman



Wawancara dengan Bapak Pio Puspito

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ladang Tembakau





Rumah Rajangan (Racik)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Daun Tembakau Setelah di Petik



Daun Tembakau Setelah di Racik/di Iris

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Daun Tembakau di Racik dan Jemur



Tembakau Linting Setelah Masak di Jemur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tembakau Linting Sebelum Dijual ke Kedai/Toko Tembakau



No.	Bentuk Data Primer	Sumber Data
<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan?</p>	<p>-Berapa besaran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun 2016-2018?</p> <p>-Bagaimana Pelaksanaan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota?</p> <p>-Apakah setiap tahun terjadi perubahan anggaran? Apa penyebab hal tersebut?</p> <p>(Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Bapak Masmed, S.Sos. tertera pada halaman: 39, 40, 42)</p> <p>-Berapa besaran lokasi DBHCHT yang diperoleh Dinas Tanam Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten 50 Kota?</p> <p>-Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan DBHCHT di Kecamatan Bukik Barisan?</p> <p>-Bagaimana cara meningkatkan kualitas bahan baku tembakau?</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Apa saja bentuk realisasi/bantuan DBHCHT yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku?

-Berapa besaran anggaran alokasi DBHCHT yang digunakan untuk kelompok tani tembakau?

(Wawancara dengan Seksi Produksi Tanaman Perkebunan di Dinas Tanam Pangan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bapak Fatmon Hendri, SP. tertera pada halaman: 41, 43-44)

-Bagaimana system pemilihan kelompok tani Demplot tembakau dan kelompok tani Subrodi?

-Apakah ada sosialisasi dari Pemerintah atau Dinas terkait mengenai kebijakan atau aturan tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBHCHT ?

-Apa saja rincian bantuan yang di berikan kepada kelompok tani Demplot tembakau?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Tembakau dengan Bapak Pio Puspito, tertera pada halaman: 44-, 45-46)

-Apa saja rincian bantuan yang di berikan kepada kelompok tani Subrodi?

(Wawancara dengan Anggota Kelompok Subrodi di Nagari Koto Tangah dengan Pak Syafwan, tertera pada halaman: 46)

-Apasaja program yang sudah terealisasi pada tahun 2018?

-Berapa persentase dan angka realisasi DBHCHT pada tahun 2018?

(Wawancara dengan Bagian Produksi Tanaman Perkebunan di Dinas Tanam Pangan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Ibuk Iis Sugiarti, tertera pada halaman: 47)

-Apa saja tugas yang dilakukan Koordinator DBHCHT Kab. 50 Kota?



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>-Berapa besaran realisasi DBHCHT pada tahun 2018?</p> <p>(Wawancara dengan Sekretariat Daerah bagian Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bapak Yusnardi, tertera pada halaman: 47-48)</p> <p>-Bagaimana pelaksanaan peningkatan kualitas bahan baku tembakau di Kecamatan Bukik Barisan?</p> <p>(Wawancara dengan APTI DPC Kabupaten Lima Puluh Kota Seksi Pemasaran dengan Bapak Azwar tertera halaman: 48)</p>
<p>2.</p>	<p>Apasaja hambatan kelompok tani di Kecamatan Bukik Barisan dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau?</p>	<p>-Apasaja faktor penghambat kelompok tani dalam meningkatkan kualitas bahan baku?</p> <p>-Bagaimana efektivitas anggaran alokasi DBHCHT di Kecamatan Bukik Barisan?</p> <p>(Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Tembakau dengan Bapak Pio Puspito, tertera halaman: 48)</p>



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Apasaja faktor penghambat petani khusus tembakau dalam meningkat kankualitas bahan baku?

-Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran alokasi DBHCHT di Kecamatan Bukik Barisan?

(Wawancara dengan APTI DPC Kabupaten Lima Puluh Kota Seksi Pemasaran dengan Bapak Azwar tertera halaman: 49-50)

-Apasaja faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas bahan baku?

(Wawancara dengan Seksi Produksi Tanaman Perkebunan di Dinas Tanam Pangan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kotadengan Bapak Fatmon Hendri, SP. tertera, halaman: 51)

-Apasaja faktor penghambat kelompok tani dalam meningkatkan kualitas bahan baku?

-Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran alokasi DBHCHT di Kecamatan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukik Barisan?

(Wawancara dengan Petani Khusus Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dengan Pak Thomas Ari Nanggalo, halaman: 51-52)

- Apasaja faktor penghambat kelompok tani dalam meningkatkan kualitas bahan baku?

-Bagaimana efektivitas pelaksanaan anggaran alokasi DBHCHT di Kecamatan BukikBarisan?

(Wawancara dengan Petani Khusus Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan dengan Bapak Salman, halaman: 52)

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU
TEMBAKAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.07/2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KECAMATAN BUKIK BARISAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

: **YOZI NOFRIONATA**
: 11527203229
: ILMU HUKUM

: Dimunqasyahkan pada :
: Hari / Tanggal : Rabu / 20 Mei 2020
: Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
Tim Penguji



1. Dr. H. Haghfirah, M.A
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Muslim S.Ag., SH., M.Hum
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Mola. Kastulani, SH, MH
(Anggota Penguji)
4. Firdaus SH, MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mungtug sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

: YOZI NOFRIONATA

: 11527203229

KEJEMAHAGAN PENDIDIKAN : UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KEJEMAHAGAN PENELITIAN : 1. DPPKAD Kab. Lima Puluh Kota

2. Dinas Tanam Pangan *Holtikultura* dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota

3. Kelompok Tani Tembakau Kab. Lima Puluh Kota

ALAMAT : Jl. Hangtuah Ujung kec. Tenayan Raya

NO HP : 081536897546

Dengan ini saya menyatakan bahwa akan mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penerbitan Rekomendasi Riset/ Penelitian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara.

Sehingga surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Agustus 2019

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



YOZI NOFRIONATA)



SURAT KETERANGAN

Sebelas, Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YOZI NOFRIONATA

NPM : 11527203229

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota.*

Pembimbing : Nur Hidayat, S.H., M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP.198804302019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7915/2019

Dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOZI NOFRIONATA
N I M : 11527203229
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **4 SEPTEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 September 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP 195807121986031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 19 Agustus 2019

: n.04/F.I/PP.00.9/6672/2019

: Biasa

: (Satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama

: YOZI NOFRIONATA

NIM

: 11527203229

Jurusan

: Ilmu Hukum S1

Semester

: IX (Sembilan)

Lokasi

1. DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kelompok Tani Tembakau Kabupaten Lima Puluh Kota.

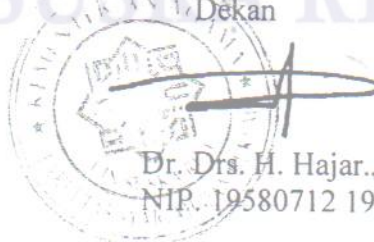
bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 0058

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/25318
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/6672/2019 Tanggal 19 Agustus 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | YOZI NOFRIONATA |
| 2. NIM / KTP | : | 11527203229 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU
TEBAKAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 222/PMK.07/2017 TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI
KECAMATAN BUKIK BARISAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DPPKAD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2. DINAS TANAM PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
3. KELOMPOK TANI TEMBAKAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342

<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 843 - PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2019

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25318 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Sehingga ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- : YOZI NOFRIONATA
- : Payakumbuh, 12 November 1995
- : Mahasiswa
- : Jl. Binjai Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
- : 1471105211950021
- : Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota
- : 1. DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota. 2. Dinas Tanam Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota. 3. Kelompok Tani Tembakau Kab. Lima Puluh Kota.
- : Agustus - September 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 20 Agustus 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MASWAR DEDI, AP, M.Si
NIP. 19740618 199311 1001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/308/BKBP-LK/VIII/2019

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Di larang mengutip untuk kepentingan komersial atau tujuan lain yang melanggar hukum.
3. Di larang mengutip untuk kepentingan politik atau tujuan lain yang melanggar hukum.
4. Di larang mengutip untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
5. Di larang mengutip untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
6. Di larang mengutip untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.

: **YOZI NOFRIONATA**
: Payakumbuh, 12-11-1995
: Mahasiswi
: Jl. Binjai RT.002/RW.010 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya
: Kota Pekanbaru Provinsi Riau
: 1471105211950021 / 11527203229
: **Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota**
: Kecamatan Bukik Barisan
: 24 Agustus s/d 31 Oktober 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahu/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Menatuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Menyerahkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota/Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 23 Agustus 2019

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIS

MULIARMAN, S.ST

NIP. 19640914 198603 1 012

Tembusan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumatera Barat di Padang.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru.
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
6. Camat Bukik Barisan di Koto Tangah.



SURAT KETERANGAN

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YOZI NOFRIONATA**
 Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 12 November 1995
 NIK/ NIM : 147105211950021/ 11527203229
 Alamat : Jl. Binjai RT 002/ RW 10 Kelurahan Kulim
 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
 Lokasi Penelitian : Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
 Lama Penelitian : 24 Agustus s/d 31 Oktober 2019

Telah melakukan Penelitian Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Cukai Tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222 / PMK.07/ 2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 25 Oktober 2019

An. KEPALA BADAN KEUANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah



MASMED, S.Sos

NIP. 19640108 198503 1 006

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kompleks Kantor Bupati Sarilamak Jl. Prof. H. Aziz Haily KM. 10 Sarilamak Telp/Fax (0752) 7470715

SURAT KETERANGAN

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini
menyatakan bahwa :

Nama : YOZI NOFRIONATA
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 12 November 1995
Nik/Nim : 147105211950021/11527203229
Alamat : Jl. Binjai Rt 002/Rw.10 Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
Kota Pekanbaru Prov. Riau
Lokasi Penelitian : Kecamatan Bukit Barisan
Tema Penelitian : 24 Agustus s/d 31 Oktober 2019

Tidak melakukan penelitian pelaksanaan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditukikanlah surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Sarilamak, 15 Oktober 2019

An.Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota
Kepala Bidang Tanaman Perkebunan

MELLY. WENAS. SP

Nip. 19791219 200312 2 008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pio Puspito
 Umur : 30 tahun
 Jabatan : Ketua Kelompok Petani Demplot Tembakau
 Tempat : Demplot Tembakau Nagari Koto Tengah, Kecamatan Bukik Barisan
 Alamat : Jr. Ngalau Godang Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan
 Pekerjaan : Petani

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yozi Nofrionata
 NIM : 11527203229
 Fak. / Jur. : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota", terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sarilamak, 4 November 2019
 Demplot Tembakau Kab. 50 Kota


 Pio Puspito)
 Ketua Kelompok





SURAT KETERANGAN PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwar
Umur : 64 tahun
Jabatan : Seksi Pemasaran
Lembaga : DPC APTI Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat : Jr. Datar Nagari Koto Tengah Kecamatan Bukik Barisan
Pekerjaan : Pedagang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yozi Nofrionata
NIM : 11527203229
Fak. / Jur. : Syariah dan Hukum/IlmU Hukum
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota", terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sarilamak, 2 November 2019
DPC APTI Kab. 50 Kota

()
Azwar
Seksi Pemasaran

1. Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

YOZI NOFRIONATA, lahir pada tanggal 12 November 1995 di Payakumbuh. Lahir dari pasangan Ismardi dan Ernita, anak ke tiga dari dua bersaudara. Dengan saudara kandung bernama Sefriadi, Martahendra, Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 027 Pekanbaru tahun 2008. Dan pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP N 14 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pekanbaru selesai pada tahun 2014. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan cita-cita dan meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Pada tanggal 19 Mei 2020 penulis mengikuti sidang munaqasah dan berhasil menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya/penulis ini tanpa menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.